



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

SISTEM PEMILU DAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Fitri Maulal Fatimi¹, Ladia Galaska², M Izud Mauliddin³;

¹Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, fitrimaolalfatimi@gmail.com

²Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, llaska627@gmail.com

³Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Mizudmauliddin@gmail.com

Abstrak: Sistem pemilu merupakan fondasi utama dalam proses demokratisasi suatu negara, termasuk Indonesia. Perubahan sistem pemilu dari waktu ke waktu memengaruhi dinamika politik dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya setelah era reformasi. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya setelah era reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka. Pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis perkembangan sistem pemilu dan dampaknya terhadap partisipasi politik, representasi rakyat, dan akuntabilitas pemerintahan. Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilu Indonesia mengalami kemajuan teknis, kualitas demokrasi masih menghadapi tantangan serius seperti politik uang, oligarki partai, dan rendahnya literasi politik masyarakat.

Kata Kunci: *Sistem Pemilu, Demokrasi, Reformasi, Kualitas Politik*

Abstract: The electoral system is a fundamental pillar in a country’s democratization process, including Indonesia. Changes in the electoral system over time have affected the political landscape and the quality of democracy. This study aims to examine the relationship between the electoral system and the quality of democracy in Indonesia, especially in the post-reform era. Using a qualitative approach and literature review method, this article analyzes the development of the electoral system and its impact on political participation, popular representation, and government accountability. The findings show that although Indonesia’s electoral system has made technical progress, democratic quality still faces serious challenges such as vote buying, party oligarchy, and low political literacy among citizens.

Keywords: *Electoral System, Democracy, Reform, Political Quality*

*Correspondence Address:	, fitrimaolalfatimi@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, demokrasi mengalami dinamika yang signifikan sejak era reformasi 1998. Salah satu indikator penting demokrasi adalah sistem pemilihan umum (pemilu) yang adil, bebas, dan transparan. Pemilu menjadi instrumen utama dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas sistem pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Sejak tahun 1999, Indonesia telah

menjalankan pemilu secara langsung, baik legislatif maupun eksekutif. Transisi dari sistem otoriter ke demokrasi membuka ruang baru bagi rakyat untuk berpartisipasi. Namun, pelaksanaan pemilu seringkali masih dibayangi oleh praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Misalnya, politik uang, manipulasi suara, dan peran dominan partai besar dalam menentukan calon. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pemilu mencerminkan prinsip demokrasi sejati.

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, terutama dalam hal sistem representasi. Mulai dari sistem proporsional tertutup hingga terbuka, serta penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Tujuan utama dari perubahan ini adalah meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi rakyat. Namun, dampaknya masih menjadi perdebatan, apakah perubahan tersebut memperkuat demokrasi atau justru memperkuat oligarki politik. Maka, penting untuk meninjau efektivitas sistem ini secara mendalam. Menurut Larry Diamond, demokrasi berkualitas ditandai oleh adanya akuntabilitas, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Ketika sistem pemilu tidak mampu menjamin hal-hal tersebut, maka demokrasi menjadi semu. Di Indonesia, meskipun proses pemilu berlangsung secara rutin, persoalan integritas tetap menjadi tantangan besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu belum sepenuhnya menjadi sarana perwujudan kehendak rakyat. Maka, kualitas pemilu perlu dikaji secara kritis sebagai refleksi kualitas demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama dari demokrasi yang sehat. Dalam konteks pemilu, partisipasi ini tidak hanya berarti datang ke TPS, tetapi juga mencakup kesadaran dan pemahaman atas pilihan politik. Sayangnya, masih banyak pemilih yang bersikap apatis atau memilih berdasarkan iming-iming materi. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, sistem pemilu harus diiringi dengan pendidikan politik yang efektif. Peran partai politik dalam sistem pemilu juga sangat menentukan kualitas demokrasi. Menurut Sartori, partai politik merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah. Di Indonesia, partai politik justru kerap menjadi sumber permasalahan, seperti pencalonan berdasarkan kepentingan elit dan tidak transparan. Kaderisasi yang lemah dan pragmatisme politik menjadikan partai hanya sebagai kendaraan kekuasaan. Reformasi internal partai menjadi penting agar pemilu benar-benar menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

Pemilu langsung kepala daerah (*Pilkada*) menjadi eksperimen demokrasi yang menarik sejak diberlakukan. Di satu sisi, *Pilkada* memberi ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin lokal secara langsung. Namun di sisi lain, biaya politik yang tinggi dalam *Pilkada* seringkali menjerumuskan calon ke praktik korupsi pasca-terpilih. Fenomena ini mencerminkan kontradiksi antara idealisme demokrasi dan praktik politik di lapangan. Maka, regulasi pemilu harus lebih adaptif dan akuntabel. Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjamin pemilu yang adil dan berintegritas. Namun, independensi dan profesionalisme lembaga ini kerap dipertanyakan. Beberapa kasus pelanggaran pemilu justru tidak ditindak tegas, bahkan ada indikasi intervensi politik. Kualitas demokrasi tidak akan tercapai jika lembaga pengawas dan penyelenggara tidak kuat dan independen. Oleh sebab itu, penguatan institusi menjadi prioritas dalam reformasi pemilu.

Media massa dan media sosial juga memainkan peran ganda dalam proses pemilu. Di satu sisi, mereka menjadi saluran informasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, media juga dapat menjadi alat propaganda, penyebaran hoaks, dan polarisasi. Pemilu di era digital membutuhkan regulasi dan literasi media yang baik agar tidak merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pemilu modern harus disertai dengan tata kelola informasi yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sistem pemilu di Indonesia dalam hubungannya dengan kualitas demokrasi. Penulis ingin menggali bagaimana sistem pemilu, dengan segala komponennya, memengaruhi partisipasi politik, kualitas representasi, dan integritas pemilu. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam

memperkuat demokrasi di Indonesia melalui reformasi sistem pemilu yang lebih inklusif, adil, dan akuntabel. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur ilmiah dan data sekunder. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

METODE | METHOD

. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sistem pemilu dan kualitas demokrasi melalui kajian literatur dan analisis wacana kritis terhadap data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi seperti KPU, Bawaslu, serta publikasi LSM dan media massa yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori permasalahan yang ditemukan dalam sistem pemilu Indonesia. Kemudian, informasi tersebut disintesis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara sistem pemilu dan kualitas demokrasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi tematik yang mendalam (Sugiyono, 2017).

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pemilu yang lebih demokratis. Temuan diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kritik dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam perbaikan sistem pemilu di Indonesia ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern. Di Indonesia, pemilu bukan hanya sarana memilih wakil rakyat, tetapi juga ukuran kualitas demokrasi yang dijalankan. Meskipun telah berlangsung secara periodik sejak era reformasi, pelaksanaan pemilu masih menyisakan banyak persoalan. Prosedur yang demokratis belum tentu menjamin hasil yang demokratis. Oleh karena itu, meninjau ulang sistem pemilu menjadi penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 1 mendeskripsikan bahwa pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa pemilu adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.

Salah satu perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia adalah pergeseran dari sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk menentukan langsung calon anggota legislatif. Namun, sistem terbuka ini justru memicu kompetisi antar caleg dalam satu partai, yang sering berujung pada politik biaya tinggi. Dampaknya adalah meningkatnya praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi. Transparansi dan pengawasan ketat menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi ini. Politik uang telah menjadi fenomena akut dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Banyak kandidat memanfaatkan uang sebagai alat untuk memengaruhi pilihan pemilih. Hal ini membuat pemilu bukan lagi pertarungan gagasan, melainkan pertarungan modal. Dalam jangka panjang, praktik ini menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan korups

Reformasi sistem pembiayaan politik sangat mendesak dilakukan untuk menjaga integritas pemilu.

2. Kualitas Demokrasi di Indonesia

Partisipasi masyarakat dalam pemilu masih menjadi tantangan. Meski angka partisipasi tinggi, banyak pemilih yang belum memahami sepenuhnya makna dan dampak pilihannya. Rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi. Kampanye politik cenderung bersifat personal dan dangkal, bukan substantif. Untuk itu, pendidikan politik yang sistematis perlu diperkuat sejak dini agar pemilih lebih kritis dan rasional. Peran partai politik dalam mencetak kader berkualitas masih jauh dari harapan. Banyak partai tidak memiliki mekanisme kaderisasi yang baik dan justru mencalonkan figur populer tanpa memperhatikan kapasitas. Dominasi elit partai juga menutup ruang demokratis di internal organisasi. Ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas representasi politik di parlemen. Reformasi partai politik menjadi prasyarat mutlak bagi perbaikan demokrasi.

Sistem ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Namun, ambang batas yang terlalu tinggi dapat mengeliminasi partai-partai kecil yang sebenarnya punya basis ideologis yang kuat. Ini membuat banyak suara rakyat tidak terwakili secara proporsional. Ketidakseimbangan ini berisiko menurunkan legitimasi pemilu dan mempersempit ruang pluralisme politik. Evaluasi berkala terhadap ambang batas sangat diperlukan. Pemilu presiden secara langsung memberikan ruang partisipasi rakyat yang lebih luas. Namun, biaya tinggi dalam kontestasi nasional menjadi hambatan besar bagi calon potensial dari kelompok independen atau minoritas. Sistem koalisi partai pun tidak selalu berbasis visi, melainkan transaksional. Hal ini membuat demokrasi cenderung elitis dan tertutup. Diperlukan mekanisme yang mendorong transparansi dan meritokrasi dalam seleksi *capres-cawapres*.

Pemilu kepala daerah (*Pilkada*) juga menghadapi dilema serupa. Meskipun memberi akses kepada rakyat untuk memilih langsung, *Pilkada* sering memunculkan pemimpin yang terjebak dalam praktik korupsi untuk membiayai kampanye. Banyak kepala daerah terseret kasus korupsi karena harus “mengembalikan investasi politik.” Regulasi pembiayaan *Pilkada* perlu diperbaiki untuk mencegah praktik politik transaksional. Pendanaan negara bagi calon bisa jadi solusi alternatif. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat vital dalam menjaga integritas pemilu. Namun, masih ada persoalan menyangkut independensi dan efektivitas lembaga ini. Beberapa pelanggaran pemilu ditangani dengan lambat atau bahkan tidak ditindak. Profesionalisme dan kapasitas SDM KPU-Bawaslu harus ditingkatkan secara terus menerus. Kemandirian lembaga penyelenggara pemilu menjadi fondasi demokrasi yang kredibel.

3. Tantangan dan Perbaikan Sistem Pemilu di Indonesia

Teknologi pemilu seperti *e-rekap* dan *SIREKAP* adalah inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis dan keraguan publik. Keamanan data dan potensi manipulasi menjadi perhatian utama. Selain itu, kesenjangan digital di daerah juga membatasi efektivitas sistem ini. Dukungan infrastruktur dan sosialisasi teknologi perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Media massa dan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dalam pemilu. Sayangnya, maraknya hoaks dan disinformasi di masa kampanye justru mengaburkan kualitas informasi politik. Banyak pemilih tidak mendapatkan informasi yang akurat dan objektif. Fenomena ini menyebabkan polarisasi dan konflik horizontal. Literasi media dan pengawasan konten politik harus diperkuat untuk menjaga kualitas demokrasi.

Pendidikan politik menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang berdaya. Saat ini, pendekatan pendidikan politik di Indonesia masih minim dan tidak menyentuh akar permasalahan. Perlu adanya sinergi antara sekolah, universitas, organisasi masyarakat, dan media dalam membangun kesadaran politik. Demokrasi hanya akan berkembang jika

masyarakat mampu memahami, mengkritisi, dan terlibat secara aktif dalam proses politik. Investasi di sektor ini akan berbuah jangka panjang. Budaya politik yang masih bersifat patronase juga menghambat perkembangan demokrasi. Pemilih cenderung loyal kepada tokoh, bukan pada ide atau program kerja. Hal ini diperparah oleh elit politik yang sering memanfaatkan simbolisme dan isu-isu sektarian untuk meraih suara. Transformasi budaya politik membutuhkan waktu dan strategi yang berkesinambungan. Proses ini harus didukung oleh reformasi sistemik dan perubahan sosial.

Demokrasi deliberatif idealnya ditandai oleh diskusi publik yang rasional dan partisipatif. Namun, forum-forum dialog politik di Indonesia sering tidak substansial. Debat kandidat lebih bersifat performatif daripada membahas kebijakan yang konkret. Publik cenderung fokus pada gaya, bukan isi. Maka, forum debat dan dialog publik perlu dirombak agar benar-benar mencerdaskan pemilih dan memperkaya demokrasi. Secara keseluruhan, sistem pemilu di Indonesia berada dalam proses transisi yang dinamis. Kemajuan telah dicapai dalam hal prosedural, tetapi aspek substansial masih menghadapi tantangan besar. Untuk mencapai demokrasi yang berkualitas, sistem pemilu harus lebih inklusif, transparan, dan berbasis merit. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dalam reformasi ini. Demokrasi bukan hanya proses lima tahunan, tetapi sebuah perjuangan berkelanjutan.

Sebagai upaya perbaikan, sejumlah usulan telah dikemukakan, di antaranya adalah kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai politik, bukan calon secara langsung. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran partai dalam mencalonkan kader terbaik dan mengurangi biaya kampanye yang tinggi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga merekomendasikan agar pemilu serentak dipisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menyederhanakan proses dan meminimalkan beban kerja.

Langkah perbaikan lainnya mencakup digitalisasi proses pemilu, seperti penggunaan e-rekapitulasi dan pengembangan e-voting di masa depan, guna meningkatkan kecepatan dan akurasi penghitungan suara. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga sangat penting untuk menjamin independensi dan profesionalisme. Di samping itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap dana kampanye dan praktik politik uang, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu.

Dengan perbaikan yang tepat, sistem pemilu Indonesia diharapkan mampu menciptakan proses pemilihan yang lebih berkualitas dan mencerminkan kehendak rakyat secara lebih murni. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu serta terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang lebih akuntabel dan berintegritas

KESIMPULAN | CONCLUSION

. Sistem pemilu memiliki peran vital dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari politik uang, partisipasi semu, hingga representasi yang tidak seimbang. Untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas, reformasi sistem pemilu harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan. Partai politik, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam membangun demokrasi yang lebih substantif. Dengan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif, Indonesia dapat melangkah menuju demokrasi yang matang dan bermartabat.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edy Kurniawansyah S.Pd M.Pd .selaku dosen mata kuliah ilmu politik,atas ilmu bimbingan ,dan arahnya yang sangat membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.Dukungan dan

masukannya yang telah diberikan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penulisan artikel ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press.
- Schedler, A. (2002). "The Menu of Manipulation." *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Kuskridho Ambardi. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja KPU*.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Kurniawansyah, E., Ardiansyah, A., Zaennurain, K., Azril, N. A., Siltania, M. D., Ifansah, T., Cantika, B. A., & Rizki, D. (2025). Strategi penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik Gen Z 2024 (Studi kasus pada KPU Kota Mataram). *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1), 277–285.
- Anwar, Saiful. (2019). *Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, A. (2020). "Dampak Sistem Pemilu Terhadap Representasi Politik di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 45–58.
- Kuskridho Ambardi, et al. (2014). *Indonesian Electoral Governance Index: Evaluating the 2014 Elections*. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2018). *Demokrasi Indonesia: Antara Prosedural dan Substansial*. Jakarta: LIPI Press.
- Pratikno. (2009). "Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 1–15.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). *Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pemilu 2024*. Tersedia di: <https://www.kpu.go.id/>